

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

Provinsi Maluku Utara

2014



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

2014

<http://haltengkab.bps.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2010- 2014**

Nomor Publikasi : 82550.1504
Katalog BPS : 9302002.8202

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 63 halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2010- 2014**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah :

Editor :

Penulis :

Pengolah data :

<http://haltengkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*finacial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran /*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

halmahera Tengah, November 2015
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Halmahera Tengah,

Oki Afrizal

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	4
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	11
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13
2.5 Perubahan Inventori	17
2.6 Ekspor dan Impor	20
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELUARAN MALUKU UTARA TAHUN 2010-2014	23
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Maluku Utara Menurut Pengeluaran	24
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	28
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	31
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	32
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	35
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	37
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	38
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	39
3.9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah	41

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2010-2014	43
4.1	PDRB (Nominal)	44
4.2	Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	45
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	45
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	46
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	47
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	47
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	48
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	49
4.9	Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	50
4.10	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	51
	PENUTUP	53
	LAMPIRAN	55
	DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014	24
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014	25
Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	26
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	27
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	27
Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014	28
Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014	30
Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	30
Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014...	31
Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	32
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	32
Tabel 12. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	34
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	36
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	37
Tabel 15. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	38
Tabel 16. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	40
Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	44
Tabel 18. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010-2014.....	45

Tabel 19.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010-2014.....	46
Tabel 20.	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	46
Tabel 21.	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010-2014.....	47
Tabel 22.	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	48
Tabel 23.	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	48
Tabel 24.	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	50
Tabel 25.	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	51
Tabel 26.	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014.....	52

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010 – 2014	25

<http://haltengkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	55
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	55
Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	56
Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	56
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	57
Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	57
Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	58
Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	58
Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	59
Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2014.....	59

PENJELASAN SIMBOL

Simbol yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut :

- * : Angka sementara
- ** : Angka sangat sementara

<http://halmengkab.bps.go.id>

<http://halmengkab.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa

tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. **Menurut Pendekatan Pengeluaran**

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah.. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk suatu wilayah.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<http://halmengkab.bps.go.id>

BAB II **METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA**

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel

12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

- b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai komponen tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak

menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;

- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP.

Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang

berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) kabupaten/kota mencakup : a. PK-Pemerintah kabupaten/kota bersangkutan; b. PK-Pemerintah pusat yang menjadi bagian dari pemerintah kab/kota; c. PK-Pemerintah provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah kab/kota; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kab/kota bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P kabupaten/kota Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten, PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari PK-P Kabupaten tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada diwilayah Kabupaten tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah Kabupaten adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial*

leasing) barang modal bekas pada pihak lain. **Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.**

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
 - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
 - d. Laporan keuangan perusahaan.
 - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
 - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.

- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

3. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian

sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.

Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;

- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan meng*inflate* perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6. EKSPOR DAN IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN

HALMAHERA TENGAH BERDASARKAN PDRB MENURUT

PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

TAHUN 2010 - 2014

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat kedinamisan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Halmahera Tengah digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN HALMAHERA TENGAH MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	356.722,1	393.150,2	423.158,9	465.173,9	521.717,0
2. Konsumsi LNPRT	11.065,0	12.368,9	14.077,5	16.160,2	18.799,6
3. Konsumsi Pemerintah	262.559,2	324.797,9	381.147,9	446.841,6	516.737,4
4. PMTB	288.934,3	387.623,5	473.969,9	518.904,0	644.489,7
5. Perubahan Inventori	190.785,8	93.306,1	395.526,2	267.122,8	(177.370,9)
6. Ekspor	749.041,9	817.192,3	744.336,22	874.513,88	1.529.134,0
7. Impor	906.915,6	951.045,9	1.220.380,5	1.258.601,4	1.652.432,1
Total PDRB	952.192,7	1.077.392,9	1.211.836,1	1.330.115,1	1.401.074,7

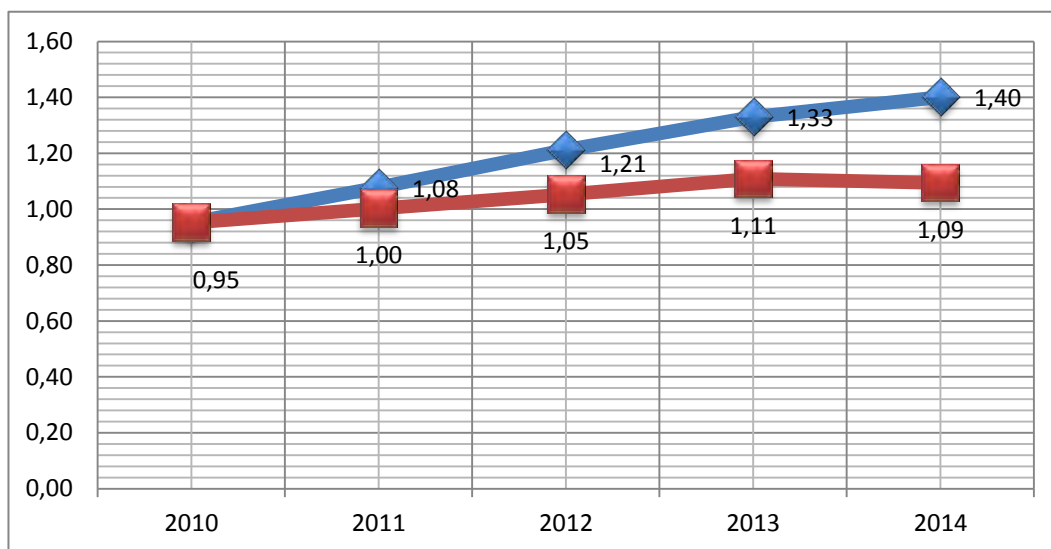
Nilai PDRB Kabupaten Halmahera Tengah (adh Berlaku) selama periode tahun 2010 s.d. 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume masing-masing komponen.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2010-2014**

Komponen Pengeluaran	(Miliar Rp)				
	2010	2011	2012	2013*	2104**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	356.722,1	372.428,7	389.081,8	402.757,9	424.270,3
2. Konsumsi LNPR	11.065,0	11.809,5	12.753,1	14.046,2	15.702,4
3. Konsumsi Pemerintah	262.559,2	296.681,7	319.460,6	343.936,1	368.386,4
4. PMTB	288.934,3	364.074,6	416.729,7	453.429,7	494.867,4
5. Perubahan Inventori	190.785,8	76.340,5	327.978,4	(588.205,4)	(164.605,4)
6. Ekspor	749.041,9	798.911,4	823.852,38	1.930.280,22	1.661.008,9
7. Impor	906.915,6	917.987,4	1.237.268,7	1.447.878,2	1.705.541,5
Total PDRB	952.192,7	1.002.259,0	1.052.587,3	1.108.366,6	1.094.088,4

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010–2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas.

Grafik 1. Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010 – 2014 (Triliun Rp)



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2010-2014**

Komponen Pengeluaran	<i>(Persen)</i>				
	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	37,46	36,49	34,92	34,97	37,24
2. Konsumsi LNPRT	1,16	1,15	1,16	1,21	1,34
3. Konsumsi Pemerintah	27,57	30,15	31,45	33,59	36,88
4. PMTB	30,94	35,98	39,11	39,01	46,00
5. Perubahan Inventori	20,04	8,66	32,64	20,08	-12,66
6. Ekspor Luar Negeri	1,09	1,87	1,74	2,28	-
7. Impor Luar Negeri	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah	-17,67	-14,29	-41,03	-31,15	-8,8
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2010 – 2014, Komponen Konsumsi Rumah Tangga dalam menyusun PDRB Kabupaten Halmahera Tengah berkisar antara 34 persen sampai 37 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi Kabupaten Halmahera Tengah masih cukup tinggi. Sedangkan konsumsi LNPRT menunjukkan share yang relatif kecil, yaitu berkisar antara 1,16 sampai 1,34 persen. Komponen Konsumsi pemerintah dan PMTB menunjukkan kenaikan share yang signifikan. Dimana pada konsumsi pemerintah dalam lima kurun terakhir memberikan share terhadap total PDRB Kabupaten Halmahera Tengah dari 27,57 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 36,88 persen pada tahun 2014, sedangkan share komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2010 sampai 2015 berturut turut sebesar 30.94, 35.98, 39.11, 39.01 dan 46.00 persen. Ekspor luar negeri tidak terlalu memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah karena diterapkannya UU minerba tentang pelarangan ekspor barang tambang mentah maka pada tahun 2014 tidak ada kegiatan produksi perusahaan pertambangan yang berdampak pada menurunnya share komponen ekspor. Sementara itu, perdagangan antar daerah Kabupaten Halmahera Tengah

yang direpresentasikan dengan komponen net ekspor antar daerah, menunjukkan bahwa nilai impor antar daerah lebih besar dari nilai ekspor antar daerah pada tahun 2010-2014. Kecenderungan perdagangan antar daerah Kabupaten Halmahera Tengah dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah
Tahun 2010-2014**

<i>(Persen)</i>				
Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,40	4,47	3,51	5,34
2. Konsumsi LNPRT	6,73	7,99	10,14	11,79
3. Konsumsi Pemerintah	13,00	7,68	7,66	7,11
4. PMTB	26,01	14,46	8,81	9,14
5. Perubahan Inventori	59,99	329,63	-279,34	72,02
6. Ekspor Luar Negeri	113,08	6,24	42,58	-100,00
7. Impor Luar Negeri	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah	-16,10	209,49	-202,76	-109,92
Total PDRB	5,26	5,02	5,30	-1,29

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. PDRB Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun 2010 s.d 2014 masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 5,26 persen (2011); 5,02 persen (2012); 5,30 persen (2013); dan -1,29 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 5,30 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2014 (-1,29 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010 - 2014**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	105,56	108,76	115,50	122,97
2. Konsumsi LNPRT	100,00	104,74	110,38	115,05	119,72
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	109,48	119,31	129,92	140,27
4. PMTB	100,00	106,47	113,74	114,44	130,23
5. Perubahan Inventori	100,00	122,22	120,60	-45,41	107,76
6. Ekspor	100,00	91,14	89,98	90,54	-
7. Impor	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah	100,00	109,08	113,80	-92,30	276,87
Total PDRB	100,00	107,50	115,13	120,01	128,06

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) mengalami fluktuasi di beberapa komponen.

3.1 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi yang cukup besar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010—2014

U r a i a n	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	356.722,1	393.150,2	423.158,9	465.713,9	521.717,0
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	356.722,1	372.428,7	389.081,8	402.757,9	424.270,3
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	37,46	36,49	34,92	34,97	37,24
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>Juta Rp</i>)					
a. ADHB	8,30	8,87	9,26	9,88	10,78
b. ADHK 2010	8,30	8,41	8,51	8,55	8,76
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT		10,21	7,63	9,93	12,16
b. Perkapita		1,29	1,25	0,51	2,44
Jumlah penduduk	42.980	44.301	45.712	47.079	48.414

Data diatas , menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adh Berlaku) maupun riil (adh Konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d. 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 37,46 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 34,92 persen.

¹ Indeks perkembangan

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2010, secara umum setiap penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah menghabiskan dana sekitar 8,30 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 8,87 juta rupiah (2011); 9,26 juta rupiah (2012); 9,88 juta rupiah (2013); dan menjadi 10,78 juta rupiah (2014).

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 0,5 sampai 2 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 2,44 persen. Dengan kata lain, rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Halmahera Tengah meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 0,51 s.d 2,44 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* sebesar 10,21 persen pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dan 2013 konsumsi rumah tangga tumbuh positif sebesar 7,63 persen dan 9,93 persen. Akhirnya pada tahun 2014 meningkat sebesar 12,16 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berkisar antara 2,84 s.d 3,19 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2010—2014³ (Persen)

No.	Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Makanan, Minuman dan Rokok	21,51	21,05	20,40	19,68	20,97
2	Pakaian dan Alas Kaki	0,94	0,94	0,93	0,92	0,97
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,83	1,81	1,80	1,82	1,95
4	Kesehatan dan Pendidikan	0,59	0,58	0,56	0,56	0,59
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	10,56	10,67	11,11	11,19	11,99
6	Hotel dan Restoran	0,62	0,63	0,68	0,71	0,74
7	Lainnya	1,41	1,46	1,49	1,47	1,55
Total Konsumsi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d. 2014, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Halmahera Tengah, bahwa konsumsi makanan, minuman, dan rokok lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga yang lainnya. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 21,51 persen (2010); 21,05 persen (2011); 20,40 persen (2012); 19,68 persen (2013); dan 20,97 persen (2014).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan pengeluaran untuk kebutuhan makanan, minuman, dan rokok menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran untuk konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya juga mempunyai peranan yang relatif besar terhadap konsumsi akhir rumah tangga dengan kontribusi sekitar 10,56 s.d 11,99 persen.

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010—2014 (Persen)

No.	Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Makanan, Minuman dan Rokok	7,34	4,17	4,86	10,12
2	Pakaian dan Alas Kaki	19,78	5,32	15,86	15,91
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,75	12,28	17,75	14,24
4	Kesehatan dan Pendidikan	7,80	5,01	9,09	13,19
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	14,42	11,66	16,40	14,06
6	Hotel dan Restoran	15,10	28,31	11,27	15,61
7	Lainnya	11,69	14,67	14,81	15,12

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan, minuman, dan rokok menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 7,34 persen (2011); 4,17 persen (2012); 4,86 persen (2013); dan 10,12 persen (2014). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan pergerakan yang berfluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan rokok sebesar 4,19 persen (2011); 2,35 persen (2012); 3,22 persen (2013); dan 4,70 persen (2014). Sementara itu, konsumsi pakaian dan alas kaki dari 14,28 persen (2011) menjadi 1,78 persen (2011). Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 10,86 persen (2013); dan 10,69 persen (2013). Sedangkan sub komponen perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga mengalami pertumbuhan berkisar antara 7,61 persen sampai 10,62 persen dalam kurun lima tahun terakhir. Di sisi lain, sub komponen Transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 9,75 persen dan Sub komponen hotel dan restoran pada tahun 2013 justru mengalami titik pertumbuhan implisit terendah yaitu sebesar 1,51 persen.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2010—2014⁴ (Persen)

No.	Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Makanan, Minuman dan Rokok	4,19	2,35	3,22	4,70
2	Pakaian dan Alas Kaki	14,28	1,78	10,86	10,69
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,21	7,76	10,62	7,61
4	Kesehatan dan Pendidikan	3,52	3,54	4,74	8,46
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	7,55	2,18	9,75	7,78
6	Hotel dan Restoran	7,56	13,94	1,51	11,57
7	Lainnya	1,95	7,32	10,70	10,38

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Konsumsi LNPRT ADHB (Juta Rupiah)	11.065,01	12.368,87	14.077,46	16.160,17	18.799,62
2	Konsumsi LNPRT ADHK 2010 (Juta Rupiah)	11.065,01	11.809,51	12.753,09	14.046,24	15.702,38
3	Proporsi Konsumsi LNPRT terhadap PDRB (Persen)	1,16	1,15	1,16	1,21	1,34

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Pengeluaran untuk konsumsi LNPRT mempunyai peranan yang relatif kecil terhadap perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sekitar 1,15 s.d 1,34 persen. Proporsi LNPRT terhadap PDRB dari tahun ke tahun relatif stabil yaitu mencapai 1,16 persen (2010); 1,15 persen (2011); 1,16 persen (2012); 1,21 persen (2013); dan 1,34 persen (2014).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2010 – 2014

No.	Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Konsumsi Pemerintah ADHB (Juta Rupiah)	262.559,17	324.797,86	381.147,88	446.841,65	516.737,36
2	Konsumsi Pemerintah ADHK 2010 (Juta Rupiah)	262.559,17	296.681,72	319.460,62	343.936,15	368.386,35
3	Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	27,57	30,15	31,45	33,59	36,88
4	Konsumsi Pemerintah ADHB Per Kapita (Juta Rupiah)	6,11	7,33	8,34	9,49	10,67
5	Konsumsi Pemerintah ADHK Per Kapita (Juta Rupiah)	6,11	6,70	6,99	7,31	7,61
6	Pertumbuhan Total Konsumsi Pemerintah ADHK (Persen)		13,00	7,68	7,66	7,11
7	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah ADHK Per Kapita (Persen)		9,63	4,35	4,54	4,16

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 262.559,17 Juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 516.737,36 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan secara berturut turut dalam kurun lima tahun terakhir, dari 27,57 persen ditahun 2010 hingga mencapai 36,88 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2010; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2014.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 6,11 juta rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang berkisar antara 7,11 persen s.d 13,00 persen.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan total konsumsi pemerintah sebesar 13,00 persen; untuk konsumsi per-kapita sebesar 9,63 persen.

3.4 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁵. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2010—2014

No.	Uraian		2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PMTB	ADHB (Juta Rp)	288.934,33	387.623,47	473.969,95	518.903,97	644.489,71
2	PMTB	ADHK 2010 (Juta Rp)	288.934,33	364.074,58	416.729,66	453.429,70	494.867,41
3	Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)		30,34	35,98	39,11	39,01	46,00
4	PMTB	Bangunan (Juta Rp)	159.386,46	187.165,86	244.580,38	268.245,09	323.137,97
5	Proporsi (%)		16,74	17,37	20,18	20,17	23,06
6	PMTB	Non Bangunan (Juta Rp)	129.547,87	200.457,61	229.389,57	250.658,88	321.351,74
7	Proporsi (%)		13,61	18,61	18,93	18,84	22,94
8	Total PMTB (Miliar Rp)		288.934,33	387.623,47	473.969,95	518.903,97	644.489,71
9	Total Proporsi (%)		30,34	35,98	39,11	39,01	46,00
10	Pertumbuhan[2] (%)						
11	PMTB Bangunan			12,86	12,89	9,46	10,37
12	PMTB Non Bangunan			42,18	16,00	8,18	7,96
	Total PMTB			26,01	14,46	8,81	9,14

⁵ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan share PMTB dalam kurun waktu 2010 - 2014 meningkat dari 30,34 persen (2010) menjadi 46,00 persen (2014). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap bruto. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun berfluktuasi tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen non bangunan.

Proporsi bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2010 – 2014 (tabel 13). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi sub komponen bangunan pada tahun 2010 sebesar 16,74 persen. Keadaan ini mengalami peningkatan menjadi 17,37 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012, bangunan meningkat kembali yaitu menjadi 20,18 persen, dan menurun kembali pada tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2014 yaitu sebesar 20,17 persen dan 23,06 persen.

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen bangunan menunjukkan pola yang sangat variatif antar tahunnya. Dalam periode tahun 2010 s.d 2014 pertumbuhan bangunan cukup berfluktuasi. Pada tahun 2011 pertumbuhan bangunan mencapai 12,86 persen, kemudian di tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 18,89 persen. Pertumbuhan bangunan melambat menjadi 9,46 persen pada tahun 2013, namun kembali terjadi peningkatan menjadi 10,37 persen pada tahun 2014. Sedangkan Non Bangunan mengalami pertumbuhan cenderung melambat dari tahun 2011 s.d 2014, yaitu dari 42,18 persen tahun 2011 menurun pada tahun 2012, 2013, dan 2014 yaitu sebesar 16,00 persen (2012); 8,18 persen (2013); dan 7,96 persen (2014).

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2011-2014 pertumbuhan total PMTB mengalami penurunan terus menerus di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai besaran angka 26,01 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,81 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net

ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2010-2014**

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perubahan Inventori ADHB (Juta Rp)	190.785,81	93.306,08	395.526,17	267.122,84	(177.370,89)
2	Perubahan Inventori ADHK (Juta Rp)	190.785,81	76.340,54	327.978,39	(588.205,44)	(164.605,40)
3	Share Perubahan Inventori (persen)	20,04	8,66	32,64	20,08	(12,66)

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2010 s.d 2013 perubahan inventori ADHB bertanda positif (terjadi penambahan persediaan barang) yaitu masing-masing sebesar 190.785,81 juta rupiah (2010); 93.306,08 rupiah (2011); 395.526,17 juta rupiah (2012); dan 267.122,84 rupiah (2013). Namun pada tahun 2014, perubahan inventori mempunyai tanda negatif yaitu minus 177.370,89 juta rupiah.

3.6 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA LUAR NEGERI

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar

negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2010 – 2014

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ekspor Luar Negeri ADHB	10.363,96	20.126,37	21.111,75	30.288,56	-
2	Ekspor Luar Negeri ADHK	10.363,96	22.083,76	23.462,54	33.453,70	-
3	Distribusi Ekspor Luar Negeri (Persen)	1,09	1,87	1,74	2,28	-
4	Laju Pertumbuhan Ekspor Luar Negeri (persen)		113,08	6,24	42,58	-

Pada tahun 2011 pertumbuhan komponen ekspor luar negeri mengalami peningkatan, dimana nilai ekspor mencapai 20.126,37 juta rupiah dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi sebesar 21.111,75 juta rupiah. Tahun 2013 ekspor mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu mencapai 30.288,56 juta rupiah. Pada tahun 2014, nilai ekspor tidak ada (.Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dari tahun 2010 s.d 2013 dengan nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 10.363,96 juta rupiah (2010); 22.083,76 juta rupiah (2011);23.462,54 juta rupiah (2012); dan 33.453,70 juta rupiah (2013). Kemudian pada tahun 2014 tidak ada. Proporsinya dalam PDRB juga memiliki pola yang sama dengan nilai nominal ekspor, yaitu dari 1,09 persen pada tahun 2010 menjadi 1,87 di tahun 2011, dan sebesar 1,74 dan 2,28 persen pada tahun 2012 dan 2013.

3.9 PERKEMBANGAN NET EKSPOR ANTAR DAERAH

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang

ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT
PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2010 - 2014**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB menurut pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014**

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	PDRB ADHB (juta Rupiah)	952.192,68	1.077.392,91	1.211.836,12	1.330.115,09	1.401.074,67
2	PDRB ADHK (Juta Rp)	952.192,68	1.002.258,98	1.052.587,28	1.108.366,57	1.094.088,40
3	PDRB perkapita ADHB	22,15	24,32	26,51	28,25	28,94
4	PDRB perkapita ADHK	22,15	22,62	23,03	23,54	22,60
5	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK		5,26	5,02	5,30	(1,29)
6	Laju Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK		2,12	1,78	2,24	-4,01
7	Jumlah Penduduk	42.980	44.301	45.712	47.079	48.414

PDRB per-kapita Kabupaten Halmahera Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2013 (tabel 17), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Halmahera Tengah rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Walaupun pada tahun 2014 harus mengalami penurunan karena kontraksi komponen ekspor, karena aktivitas pertambangan yang menurun.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 2 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2 sampai 3 persen dalam kurun lima tahun terakhir.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2010—2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	356.722,11	393.150,23	423.158,95	465.173,94	521.716,98
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	288.934,33	387.623,47	473.969,95	518.903,97	644.489,71
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	1,23	1,01	0,89	0,90	0,81

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 1,23 pada tahun 2010 menjadi 1,01 pada tahun 2011. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 0,89 (2012), namun meningkat di tahun 2013 sebesar 0,90 dan kembali menurun menjadi 0,81 (2014). Hal ini terjadi karena adanya penurunan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2010-2014**

No. (1)	Uraian (2)	2010	2011 (4)	2012 (5)	2013* (6)	2014** (7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	356.722,11	393.150,23	423.158,95	465.173,94	521.716,98
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11.065,01	12.368,87	14.077,46	16.160,17	18.799,62
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	262.559,17	324.797,86	381.147,88	446.841,65	516.737,36
4	Jumlah	630.346,29	730.316,96	818.384,28	928.175,76	1.057.253,95
5	PDRB ADHB	952.192,68	1.077.392,91	1.211.836,12	1.330.115,09	1.401.074,67
6	Proporsi (%)	66,20	67,79	67,53	69,78	75,46

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 60 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, proporsinya terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

”ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”.

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak ”K” unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 18. Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Halmahera Tengah, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah) (miliar rupiah)	952.192,68	1.002.258,98	1.052.587,28	1.108.366,57	1.094.088,40
Perubahan (Juta Rupiah) (miliar rupiah)	-	50.066,30	50.328,30	55.779,30	(14.278,17)
PMTB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	288.934,33	364.074,58	416.729,66	453.429,70	494.867,41
ICOR	-	7,27	8,28	8,13	(34,66)

Karena Besaran ICOR bergantung kepada dua variabel maka nilai perubahan output maupun PMTB sangat mempengaruhi nilai rasio tersebut. jika dilihat pada tabel diatas maka nilai ICOR pada tahun 2014 bernilai negatif karena perubahan output pada tahun tersebut juga bernilai negatf. Kesimpulannya walaupun capital dilakukan penambahan setiap tahun, namun bukan berarti bahwa hal tersebut akan tetap berdampak positif karena masih ada variabel lain yang memengaruhi perubahan.

<http://halmengkab.bps.go.id>

<http://halmengkab.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d. 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB menurut pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB menurut pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d. 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<http://halmengkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	356.722,1	393.150,2	423.158,9	465.173,9	521.717,0
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	204.810,3	219.844,3	229.015,5	240.140,8	264.449,4
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8.978,1	10.754,1	11.326,7	13.123,3	15.210,6
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tar	17.423,6	19.645,2	22.057,1	25.973,1	29.671,0
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5.629,3	6.068,4	6.372,2	6.951,7	7.868,9
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100.542,9	115.037,1	128.455,5	149.523,1	170.552,5
1.f. Hotel dan Restoran	5.941,5	6.838,8	8.775,0	9.763,9	11.288,5
1.g. Lainnya	13.396,5	14.962,4	17.157,0	19.698,1	22.676,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11.065,0	12.368,9	14.077,5	16.160,2	18.799,6
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	262.559,2	324.797,9	381.147,9	446.841,6	516.737,4
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	288.934,3	387.623,5	473.969,9	518.904,0	644.489,7
4.a. Bangunan	159.386,5	187.165,9	244.580,4	268.245,1	323.138,0
4.b. Non-Bangunan	129.547,9	200.457,6	229.389,6	250.658,9	321.351,7
5. Perubahan Inventori	190.785,8	93.306,1	395.526,2	267.122,8	(177.370,9)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	10.364,0	20.126,4	21.111,8	30.288,6	-
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-	-	-	-	-
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(168.237,7)	(153.980,0)	(497.156,0)	(414.376,0)	(123.298,1)
8.a. Ekspor	738.677,9	797.065,9	723.224,5	844.225,3	1.529.134,0
8.b. Impor	906.915,6	951.045,9	1.220.380,5	1.258.601,4	1.652.432,1
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	952.192,7	1.077.392,9	1.211.836,1	1.330.115,1	1.401.074,7

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://haltengkab.bps.go.id>

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014**

(Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	356.722,1	372.428,7	389.081,8	402.757,9	424.270,3
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	204.810,3	211.001,2	214.750,8	218.164,3	229.469,7
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	8.978,1	9.410,1	9.737,5	10.176,8	10.656,7
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tar	17.423,6	18.155,1	18.916,9	20.137,2	21.377,0
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5.629,3	5.862,1	5.945,2	6.192,2	6.462,3
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100.542,9	106.966,1	116.891,0	123.977,1	131.211,2
1.f. Hotel dan Restoran	5.941,5	6.358,2	7.160,0	7.848,2	8.132,7
1.g. Lainnya	13.396,5	14.675,8	15.680,5	16.262,1	16.960,6
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11.065,0	11.809,5	12.753,1	14.046,2	15.702,4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	262.559,2	296.681,7	319.460,6	343.936,1	368.386,4
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	288.934,3	364.074,6	416.729,7	453.429,7	494.867,4
4.a. Bangunan	159.386,5	179.877,8	203.063,7	222.279,4	245.323,2
4.b. Non-Bangunan	129.547,9	184.196,8	213.666,0	231.150,3	249.544,2
5. Perubahan Inventori	190.785,8	76.340,5	327.978,4	(588.205,4)	(164.605,4)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	10.364,0	22.083,8	23.462,5	33.453,7	-
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-	-	-	-	-
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(168.237,7)	(141.159,8)	(436.878,8)	448.948,4	(44.532,6)
8.a. Ekspor	738.677,9	776.827,6	800.389,8	1.896.826,5	1.661.008,9
8.b. Impor	906.915,6	917.987,4	1.237.268,7	1.447.878,2	1.705.541,5
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	952.192,7	1.002.259,0	1.052.587,3	1.108.366,6	1.094.088,4

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://halmengkab.bps.go.id>

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	37,46	36,49	34,92	34,97	37,24
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	21,51	20,41	18,90	18,05	18,87
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,94	1,00	0,93	0,99	1,09
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tar	1,83	1,82	1,82	1,95	2,12
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,59	0,56	0,53	0,52	0,56
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,56	10,68	10,60	11,24	12,17
1.f. Hotel dan Restoran	0,62	0,63	0,72	0,73	0,81
1.g. Lainnya	1,41	1,39	1,42	1,48	1,62
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,15	1,16	1,21	1,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	27,57	30,15	31,45	33,59	36,88
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	30,34	35,98	39,11	39,01	46,00
4.a. Bangunan	16,74	17,37	20,18	20,17	23,06
4.b. Non-Bangunan	13,61	18,61	18,93	18,84	22,94
5. Perubahan Inventori	20,04	8,66	32,64	20,08	(12,66)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	1,09	1,87	1,74	2,28	-
6.a. Barang	-	-	-	-	-
6.b. Jasa	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-	-	-	-	-
7.a. Barang	-	-	-	-	-
7.b. Jasa	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(17,67)	(14,29)	(41,03)	(31,15)	(8,80)
8.a. Ekspor	77,58	73,98	59,68	63,47	109,14
8.b. Impor	95,24	88,27	100,71	94,62	117,94
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://haltengkab.bps.go.id>

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	37,46	37,16	36,96	36,34	38,78
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	21,51	21,05	20,40	19,68	20,97
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	0,94	0,94	0,93	0,92	0,97
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tar	1,83	1,81	1,80	1,82	1,95
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	0,59	0,58	0,56	0,56	0,59
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,56	10,67	11,11	11,19	11,99
1.f. Hotel dan Restoran	0,62	0,63	0,68	0,71	0,74
1.g. Lainnya	1,41	1,46	1,49	1,47	1,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,16	1,18	1,21	1,27	1,44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	27,57	29,60	30,35	31,03	33,67
3.a. Konsumsi Kolektif	-	-	-	-	-
3.b. Konsumsi Individu	-	-	-	-	-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	30,34	36,33	39,59	40,91	45,23
4.a. Bangunan	16,74	17,95	19,29	20,05	22,42
4.b. Non-Bangunan	13,61	18,38	20,30	20,86	22,81
5. Perubahan Inventori	20,04	7,62	31,16	(53,07)	(15,04)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	1,09	2,20	2,23	3,02	-
6.a. Barang	-	-	-	-	-
6.b. Jasa	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	-	-	-	-	-
7.a. Barang	-	-	-	-	-
7.b. Jasa	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(17,67)	(14,08)	(41,51)	40,51	(4,07)
8.a. Ekspor	77,58	77,51	76,04	171,14	151,82
8.b. Impor	95,24	91,59	117,55	130,63	155,89
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://halmengkab.bps.go.id>

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	10,21	7,63	9,93	12,16
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,34	4,17	4,86	10,12
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	19,78	5,32	15,86	15,91
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,75	12,28	17,75	14,24
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	7,80	5,01	9,09	13,19
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,42	11,66	16,40	14,06
1.f. Hotel dan Restoran	15,10	28,31	11,27	15,61
1.g. Lainnya	11,69	14,67	14,81	15,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,78	13,81	14,79	16,33
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	23,70	17,35	17,24	15,64
3.a. Konsumsi Kolektif				
3.b. Konsumsi Individu				
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	34,16	22,28	9,48	24,20
4.a. Bangunan	17,43	30,68	9,68	20,46
4.b. Non-Bangunan	54,74	14,43	9,27	28,20
5. Perubahan Inventori	(51,09)	323,90	(32,46)	(166,40)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	94,20	4,90	43,47	(100,00)
6.a. Barang				
6.b. Jasa				
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)				
7.a. Barang				
7.b. Jasa				
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(8,47)	222,87	(16,65)	(70,24)
8.a. Ekspor	7,90	(9,26)	16,73	81,13
8.b. Impor	4,87	28,32	3,13	31,29
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	13,15	12,48	9,76	5,33

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://haltengkab.bps.go.id>

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)			
	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,40	4,47	3,51	5,34
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,02	1,78	1,59	5,18
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,81	3,48	4,51	4,72
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,20	4,20	6,45	6,16
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,14	1,42	4,16	4,36
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,39	9,28	6,06	5,84
1.f. Hotel dan Restoran	7,01	12,61	9,61	3,62
1.g. Lainnya	9,55	6,85	3,71	4,30
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,73	7,99	10,14	11,79
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	13,00	7,68	7,66	7,11
3.a. Konsumsi Kolektif				
3.b. Konsumsi Individu				
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	26,01	14,46	8,81	9,14
4.a. Bangunan	12,86	12,89	9,46	10,37
4.b. Non-Bangunan	42,18	16,00	8,18	7,96
5. Perubahan Inventori	(59,99)	329,63	(279,34)	(72,02)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	113,08	6,24	42,58	(100,00)
6.a. Barang				
6.b. Jasa				
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)				
7.a. Barang				
7.b. Jasa				
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	(16,10)	209,49	(202,76)	(109,92)
8.a. Ekspor	5,16	3,03	136,99	(12,43)
8.b. Impor	1,22	34,78	17,02	17,80
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	5,26	5,02	5,30	(1,29)

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Berlaku
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	110,21	118,62	130,40	146,25
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	107,34	111,82	117,25	129,12
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	119,78	126,16	146,17	169,42
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tar	100,00	112,75	126,59	149,07	170,29
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	107,80	113,20	123,49	139,78
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	114,42	127,76	148,72	169,63
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	115,10	147,69	164,33	190,00
1.g. Lainnya	100,00	111,69	128,07	147,04	169,27
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	111,78	127,22	146,05	169,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	123,70	145,17	170,19	196,81
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	134,16	164,04	179,59	223,06
4.a. Bangunan	100,00	117,43	153,45	168,30	202,74
4.b. Non-Bangunan	100,00	154,74	177,07	193,49	248,06
5. Perubahan Inventori	100,00	48,91	207,31	140,01	(92,97)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100,00	194,20	203,70	292,25	-
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)					
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	91,53	295,51	246,30	73,29
8.a. Ekspor	100,00	107,90	97,91	114,29	207,01
8.b. Impor	100,00	104,87	134,56	138,78	182,20
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	113,15	127,27	139,69	147,14

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://haltengkab.bps.go.id>

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	104,40	109,07	112,91	118,94
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	103,02	104,85	106,52	112,04
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	104,81	108,46	113,35	118,70
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tar	100,00	104,20	108,57	115,57	122,69
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	104,14	105,61	110,00	114,80
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	106,39	116,26	123,31	130,50
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	107,01	120,51	132,09	136,88
1.g. Lainnya	100,00	109,55	117,05	121,39	126,60
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	106,73	115,26	126,94	141,91
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	113,00	121,67	130,99	140,31
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	126,01	144,23	156,93	171,27
4.a. Bangunan	100,00	112,86	127,40	139,46	153,92
4.b. Non-Bangunan	100,00	142,18	164,93	178,43	192,63
5. Perubahan Inventori	100,00	40,01	171,91	(308,31)	(86,28)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100,00	213,08	226,39	322,79	-
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)					
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	83,90	259,68	(266,85)	26,47
8.a. Ekspor	100,00	105,16	108,35	256,79	224,86
8.b. Impor	100,00	101,22	136,43	159,65	188,06
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	105,26	110,54	116,40	114,90

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010 = 100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	100,00	105,56	108,76	115,50	122,97
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	100,00	104,19	106,64	110,07	115,24
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	114,28	116,32	128,95	142,73
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tar	100,00	108,21	116,60	128,98	138,80
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	103,52	107,18	112,26	121,77
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	100,00	107,55	109,89	120,61	129,98
1.f. Hotel dan Restoran	100,00	107,56	122,56	124,41	138,80
1.g. Lainnya	100,00	101,95	109,42	121,13	133,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,00	104,74	110,38	115,05	119,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	100,00	109,48	119,31	129,92	140,27
3.a. Konsumsi Kolektif					
3.b. Konsumsi Individu					
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	100,00	106,47	113,74	114,44	130,23
4.a. Bangunan	100,00	104,05	120,45	120,68	131,72
4.b. Non-Bangunan	100,00	108,83	107,36	108,44	128,78
5. Perubahan Inventori	100,00	122,22	120,60	(45,41)	107,76
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	100,00	91,14	89,98	90,54	
6.a. Barang					
6.b. Jasa					
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)					
7.a. Barang					
7.b. Jasa					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	100,00	109,08	113,80	(92,30)	276,87
8.a. Ekspor	100,00	102,61	90,36	44,51	92,06
8.b. Impor	100,00	103,60	98,64	86,93	96,89
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	100,00	107,50	115,13	120,01	128,06

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2010-2014

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	5,56	3,03	6,20	6,47
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,19	2,35	3,22	4,70
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	14,28	1,78	10,86	10,69
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,21	7,76	10,62	7,61
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,52	3,54	4,74	8,46
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,55	2,18	9,75	7,78
1.f. Hotel dan Restoran	7,56	13,94	1,51	11,57
1.g. Lainnya	1,95	7,32	10,70	10,38
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,74	5,39	4,23	4,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	9,48	8,98	8,89	7,97
3.a. Konsumsi Kolektif				
3.b. Konsumsi Individu				
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	6,47	6,83	0,62	13,80
4.a. Bangunan	4,05	15,76	0,19	9,15
4.b. Non-Bangunan	8,83	(1,35)	1,01	18,75
5. Perubahan Inventori	22,22	(1,33)	(137,66)	(337,28)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	(8,86)	(1,27)	0,62	
6.a. Barang				
6.b. Jasa				
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)				
7.a. Barang				
7.b. Jasa				
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a. - 8.b.)	9,08	4,32	(181,11)	(399,97)
8.a. Ekspor	2,61	(11,94)	(50,74)	106,84
8.b. Impor	3,60	(4,79)	(11,87)	11,46
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	7,50	7,10	4,24	6,71

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

<http://halmengkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
14. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.

16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev.1, New York, 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York, 2000.
20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama *Asian Development Bank* dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993



DATA

Mencerdaskan Bangsa